

Collaborative Governance dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) Di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Collaborative Governance in Handling The Covid-19 Pandemic on Mangkubumen, Banjarsari, Surakarta City

Muhammad Rofi'ud Muta'al¹, Dr. Winarti, M.Si.², Drs. Joko Suranto, M.Si.³

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

mutaal3110@gmail.com, winartitik59@gmail.com, jokosuranto052@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak adanya pandemi Covid-19, Berbagai upaya dan kebijakan di lakukan oleh pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat persebaran yang tinggi. Kelurahan Mangkubumen yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah konfirmasi kasus positif yang relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa kelurahan lain dan telah mencapai nol kasus pada bulan-bulan tertentu di tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah Kelurahan Mangkubumen dalam berkolaborasi melakukan penanganan pandemi Covid-19. Metode yang digunakan Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dianalisis menggunakan Teknik Analisis Data menurut Huberman dan Saldana (2014:14). Penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen dianalisis menggunakan Teori *Collaborative Governance* menurut De Seve (2007:50), terdapat delapan indikator yaitu *Network Structure, Trust among the participants, Governance, Acces to authority, Distributive accountability, Information sharing, dan Acces to resources*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen berhasil, berdasarkan indikator *Collaborative Governance*.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Penanganan Covid-19, Peran Kelurahan

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that affected by the Covid-19 pandemic. Many efforts and policies have been carried out by the government in handling the COVID-19 pandemic in Indonesia. Surakarta City is one of the cities in Central Java Province with a high distribution rate. The Mangkubumen urban village which is the location of this research is one of the urban villages with a relatively low number of confirmed positive cases when compared to several other urban villages and has reached zero cases in certain months in 2021. The purpose of this research is to describe and analyze the steps of Mangkubumen Urban Village in collaborating in handling the Covid-19 pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative, which was analyzed using

Data Analysis Techniques according to Huberman and Saldana (2014:14). The handling of the Covid-19 pandemic in Mangkubumen Village was analyzed using Collaborative Governance Theory according to De Seve (2007: 50), there are eight indicators, namely Network Structure, Trust among the participants, Governance, Access to authority, Distributive accountability, Information sharing, and Access to resources. The results of this study can be concluded that the handling of the covid-19 pandemic in the Mangkubunmen Village was successful, based on the Collaborative Governance indicators.

Keywords: *Collaborative Governance, Covid-19 Handling, Role of Kelurahan*

PENDAHULUAN

Covid-19 termasuk sebagai masalah global, dan telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020 yang telah terkonfirmasi di 189 negara. Penyebaran virus *covid-19* terkonfirmasi pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, dalam rangka penanganan pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan pandemi, Salah satu kebijakan tersebut, dengan membuat tim kerja gugus tugas dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Ketua gugus tugas covid-19 di tingkat pemerintah pusat dipimpin langsung oleh kepala BNPB yaitu Letjen. Doni Monardo. Selain dengan membentuk tim kerja, Pemerintah pusat juga memberikan desentralisasi yakni pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Kota Surakarta yang merupakan lokasi penelitian ini merupakan salah satu kota di Jawa Tengah, dengan persebaran kasus covid 19 yang tinggi. Pemerintah daerah menjadi unsur yang paling bertanggungjawab di wilayahnya dalam penanganan covid-19. Kepala daerah diharuskan membuat keputusan teknis, yang mana tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah yaitu *Jogo Tonggo*. *Jogo Tonggo* juga diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Instruksi Gubernur Jateng No 1 Tahun 2020, untuk diterapkan di Kota/Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disesuaikan oleh Walikota/Bupati tersebut.

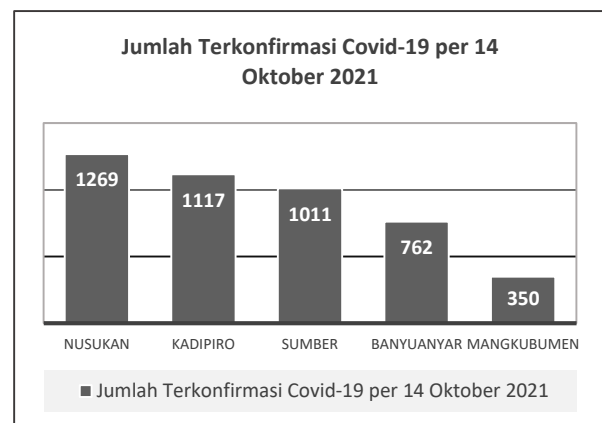
Kota Surakarta juga menjadi salah satu kota yang terus berupaya mengatasi pandemi covid-19, berbagai kebijakan juga sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Salah satu kebijakan yang diambil oleh

pemerintah seperti mempercepat program vaksinasi massal untuk seluruh masyarakat Kota Surakarta. Alhasil, Kota Surakarta menjadi salah satu dengan pencapaian vaksinasi yang tertinggi di Indonesia yang sudah mencapai 92,5% dari target 417.151 masyarakat Kota Surakarta yang dilansir dari situs resmi pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 067/495 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasi Peran Satuan Tugas Kelurahan dalam Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Surakarta. Walikota Surakarta juga melakukan optimalisasi peran dalam penanganan covid-19 ini hingga tingkat kelurahan. Sehingga Kelurahan yang ada di Kota Surakarta juga memiliki peran penting dalam membantu keberhasilan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Kota Surakarta.

Kelurahan Mangkubumen yang menjadi lokus dari penelitian ini, merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Surakarta, dengan jumlah konfirmasi kasus positif yang relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa kelurahan lain. Tercatat menurut Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo yang dilansir melalui laman <https://covid.intip.surakarta.go.id/>

tercatat Kasus positif di Kelurahan Mangkubumen hingga 14 Oktober 2021 sejumlah 350 kasus positif, cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Kelurahan Nusukan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Sumber, Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Jebres yang mencapai diatas 1000 kasus positif.

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kasus Positif Covid-19 antar beberapa kelurahan di Kecamatan Banjarsari



Sumber : <https://covid.intip.surakarta.go.id/>

Menurut konfirmasi Kepala Kelurahan Mangkubumen yang ditemui oleh peneliti pada 7 Oktober 2021, di Kelurahan Mangkubumen sudah tidak ada kasus positif covid-19. Keberhasilan Kelurahan Mangkubumen dalam mewujudkan Kelurahan Mangkubumen yang terhindar dari covid-19 dan dapat menurunkan angka positif yang juga tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak di luar kelurahan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah atau bisa disebut dengan

collaborative governance. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen ini meliputi : Unsur Kelurahan, Unsur masyarakat yang tergabung dalam satgas joko tonggo, unsur pemerintah kota dalam Dinas Kesehatan yang direpresentasikan melalui Puskesmas, dan juga unsur TNI dan Polri melalui Babinsa dan Babinkamtibnas.

Collaborative Governance menurut La Ode (2018 : 4) merupakan jenis tata pemerintahan, yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non pemerintah untuk bekerja bersama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi kebijakan. Berdasarkan Penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* sangat penting dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam implementasi kebijakan. Begitu pula dalam upaya penanganan covid di tingkat kelurahan, yang merupakan ujung tombak pemerintah kota di kalangan masyarakat yang juga membutuhkan dan menerapkan strategi *Collaborative Governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moh. Nazir (2012 : 54) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan definisi Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2010 : 9) adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan beberapa data dan analisis data bersifat induktif. Sehingga disimpulkan Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Gambaran yang diperoleh secara sistematis dan perolehan fakta-fakta terhadap suatu kejadian dianalisis, diinterpretasikan serta disajikan sesuai keadaan sebenarnya berdasarkan informasi maupun obyek yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2014). Dalam model analisis ini, tiga komponen analisisnya yaitu

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus menerus hingga membentuk siklus.

PEMBAHASAN

Collaborative Governance merupakan sebuah usaha dan proses yang terlaksana secara kolektif oleh beberapa aktor di luar pemerintah yang berkerjasama atau berkolaborasi dengan pemerintah dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik dengan lebih efektif dan efisien. Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh De Seve (2007 : 50) menyebutkan bahwa terdapat delapan indikator dalam menilai sebuah kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

1. *Networked Structure*

Networked structure menjelaskan tentang bentuk dari kolaborasi dan sinergitas dari Pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. Adanya kejelasan mengenai bentuk kolaborasi sangatlah penting dalam berjalannya proses kolaborasi, karena dapat memberikan arah dan pedoman dalam

bagaimana melaksanakan dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan posisi atau fungsi tugasnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi di Kelurahan Mangkubumen adalah Kelurahan, Satgas JogoTonggo, Puskesmas, BABINSA dan BABINKAMTIBNAS.

Berdasarkan hasil analisis, jenis jaringan pada kolaborasi pada penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen tergolong pada jenis *Lead Organization*. *Lead Organization* menurut Milward and Provan ditandai dengan adanya sebuah entitas administratif dan juga manajer yang melakukan jaringan sebagai anggota network/ penyedia pelayanan. Model ini sifatnya lebih tersentralisir jika dibandingkan dengan model *Self Governance*. Jenis jaringan dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen termasuk ke dalam kategori *Leads Organization* karena berdasarkan hasil wawancara, terdapat satu indikator adanya entitas administrasi, yaitu pada Ketua Satgas JogoTonggo memiliki bukti administrasi secara jelas berupa SK Pengangkatan petugas satgas yang diberikan secara langsung oleh Lurah Mangkubumen, Namun, diantara pihak-pihak lain tidak memiliki *MoU* atau Perjanjian secara tertulis. Sehingga jenis struktur kolaborasi yang

sesuai adalah *Lead Organization*. Bentuk sinergi juga dapat dilihat pada pembagian tugas juga dilakukan, Kelurahan berfungsi sebagai fasilitator dan mobilisator setiap program atau kegiatan yang berjalan mengenai penanganan pandemi covid-19, kelurahan juga turut mengontrol, memonitoring jalannya isolasi, tracing, dan penjemputan pasien. Sedangkan Satgas JogoTonggo bertugas sebagai pendamping masyarakat yang menjalani isolasi, terkait kebutuhan yang dibutuhkan, selain itu satgas juga bertugas untuk berkomunikasi dengan kelurahan apabila ada kejadian di lingkungan masyarakat. Sedangkan dari Puskesmas bertugas untuk memberikan pendampingan terhadap tracing dan proses test yang dilakukan, kemudian dikomunikasikan kepada Kelurahan dan Satgas untuk dapat ditindaklanjuti. Sedangkan BABINSA dan BABINKAMTIBNAS bertugas untuk melakukan pendampingan dan edukasi di setiap proses penanganan seperti tracing, penyerahan bantuan, isolasi, dan sebagainya. Kelima pihak tersebut turut aktif bersama baik dalam pelaksanaan program, ataupun rapat koordinasi sebagai bentuk kolaborasi antar stakeholder. Bimbingan Teknis dan pelatihan juga diselenggarakan sebagai upaya penguatan kelembagaan antar

stakeholder yang biasa diselenggarakan oleh puskesmas.

2. *Commitment to a common purpose*

Commitment to a common purpose adalah tujuan bersama dan kesepemahaman antara Pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. *Commitment to a Common Purpose* biasanya mencakup adanya Visi, Misi dan tujuan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen dan juga penguatan tujuan bersama dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. Berdasarkan hasil data yang ada di lapangan, Kelurahan Mangkubumen tidak memiliki tujuan bersama yang dirumuskan bersama sebagaimana dimaksud dalam teori. Meskipun tidak memiliki tujuan bersama yang dibuat secara langsung khusus dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, tetapi memiliki tujuan yang tercantum pada Surat Edaran Walikota Nomor 440/1439 tahun 2020 yaitu Melakukan Upaya percepatan penanganan covid-19 berbasis masyarakat dengan memberdayakan Seluruh potensi yang ada secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan :

a. Kesejahteraan Warga

- b. Kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga
- c. Kondisi Perekonomian masyarakat
- d. Kepastian pemenuhan kebutuhan

Berdasarkan dengan hasil wawancara, adapun Program-program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesepemahaman dan penguatan tujuan bersama yaitu mengedukasi masyarakat supaya hidup sehat, menghimbau di tempat-tempat ibadah, atau di tempat-tempat yang menyebabkan kerumunan lainnya. Lalu melakukan tes swab bagi warga yang mengalami gejala-gejala positif atau sakit, biasanya dilakukan di puskesmas Manahan. Selain itu, juga memfasilitasi untuk melakukan isolasi baik secara mandiri atau terpusat. Lalu upaya lainnya, biasanya melakukan tracing bagi keluarga yang tinggal serumah yang positif, juga turut membantu memberikan bantuan sembako bagi yang menjalani isolasi mandiri. Bantuan lain tidak hanya menutup dari Dinas Sosial atau Kecamatan saja, melainkan juga ada bantuan yang didapatkan dari swasta atau dunia usaha, namun Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara terpusat oleh pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan triangulasi sumber data yang dilakukan, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program-program yang dilaksanakan tersebut, bukanlah program yang khusus atau inovasi dari Kelurahan Mangkubumen, karena program program tersebut juga sudah di atur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Namun, pelaksanaan program-program tersebut aktif dilaksanakan dengan kontribusi masyarakat. Pada indikator Commitment to a Common Purpose ini penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen telah memenuhi indikator tujuan bersama, karena pada penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, meskipun tujuan tersebut tidak dibuat secara murni oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan di Kelurahan Mangkubumen. Selain itu, menurut hasil analisa peneliti, juga telah terpenuhi indikator yang kedua yaitu penguatan tujuan bersama dan kesepemahaman, dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan di atas yang dapat meningkatkan kapasitas petugas dan penguatan.

3. *Trust among the participants*

Trust among the participants adalah Profesionalitas dan ketepatan pelaksanaan

tugas pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. *Trust among the participants* dapat dinilai melalui Terlaksananya program kerja atau kebijakan dari masing-masing pihak dan Ketepatan waktu, biaya, dan sasaran dalam pelaksanaan program penanganan pandemi covid-19. Tingkat kepercayaan dalam menjalin sinergitas atau kolaborasi dapat dilihat dari bagaimana berjalannya program yang dilaksanakan bersama. Berdasarkan hasil data penelitian di lapangan, program atau kegiatan penanganan pandemi di Kelurahan Mangkubumen sudah dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga pada bulan oktober tingkat kasus persebaran di Kelurahan Mangkubumen sudah mencapai 0 kasus. Menurut peneliti, berdasarkan dengan hasil data dokumen yang ada yang dilansir dari data tingkat terkonfirmasi virus yang ada di Kelurahan Mangkubumen, tingkat penurunan kasus terjadi pada bulan mei dan oktober yang bisa mencapai 0 kasus di Kelurahan Mangkubumen, dan hal tersebut dapat dijadikan penguat dalam mengukur kinerja petugas penanganan pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen yang benar-benar sudah berjalan dengan lancar dengan keterlibatan penuh antar pihak secara profesional. Pada indikator ketepatan sasaran

dalam menjalankan program pada penanganan pandemi di Kelurahan Mangkubumen juga sudah tepat sasaran karena berdasarkan hasil dari triangulasi sumber data yang menunjukkan hasil jawaban yang sama dari ketiga informan yang diwawancarai.

4. *Governance*

Aspek *Governance* yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dalam segi transparansi, pemerintah juga terbuka dalam memberikan akses data kepada masyarakat mengenai jumlah kasus atau terkonfirmasi positif di Kelurahan Mangkubumen. Masyarakat dapat mengakses data tersebut dengan prosedur yang mudah, yaitu bisa menanyakan kepada RT RW yang bersangkutan maupun kepada petugas di kelurahan. Dalam segi akuntabilitas, setiap pihak memiliki tanggungjawab untuk melaporkan data atau kejadian di Kelurahan Mangkubumen, Pihak Kelurahan memiliki tanggungjawab untuk melaporkan pertanggungjawaban pada Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Satgas JogoTonggo dan

Puskesmas juga memberikan laporan pada Kelurahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian, Babinsa dan Babinkamtibnas meskipun tidak memiliki tanggungjawab untuk memberikan laporan pada Kelurahan Mangkubumen, tetapi secara tidak langsung juga membantu dalam jalannya pengumpulan data atau pengumpulan pertanggungjawaban. Dan masyarakat juga turut bertanggungjawab membantu dalam memberikan dana swadaya kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri, namun juga tidak sedikit masyarakat yang tidak sadar dan acuh tak acuh dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Dan dalam segi partisipasi, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, bentuk partisipasi dari masyarakat adalah turut bergabung dalam satgas joko tonggo, atau masyarakat yang tidak bergabung dengan satgas jogotonggo dapat membantu donasi ataupun mengikuti kerja bakti wilayah.

De Seve (2007 : 50) menyebutkan salah satu bagian bagi berhasilnya sebuah jaringan (network) atau kolaborasi adalah kejelasan dalam tata kelola pemerintah, termasuk diantaranya adalah *Boundary* dan *exclusivity*, *Rules* (aturan-aturan), *Self determination* , *Network management*. Berdasarkan hasil

wawancara dan data sekunder, dari empat poin yang ada dalam teori di atas, Penanganan Pandemi di Kelurahan Mangkubumen meliputi *Boundary* dan *exclusivity* yang dapat dibuktikan dengan adanya petugas petugas yang secara terbatas dalam melakukan penanganan. Sedangkan *Rules* tidak ada peraturan yang jelas yang berkaitan dengan keanggotaan, tetapi terdapat aturan yang mengatur segala bentuk tindakan yang ada. Sedangkan *Self determination* dan *Network management* masih belum terlaksana secara tegas karena apa yang dilaksanakan mengacu pada atauran atau SOP yang telah ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator kepastian *governance* menurut teori De Seve belum terpenuhi keempat aspek secara penuh.

5. *Acces to Authority*

Acces to authority adalah kewenangan dan desain proses dari penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. Yakni tersedianya standar-standar atau ukuran-ukuran ketentuan atas prosedur-prosedur yang jelas dan dapat diterima secara luas. *Access to Autorithy* meliputi landasan hukum dalam penanganan pandemi covid-19, dan Standarisasi dalam penanganan pandemi covid-19 oleh Pemerintah. Berdasarkan hasil

wawancara, terdapat landasan hukum dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, yaitu Surat Edaran Walikota Nomor 440/1439 tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas JogoTonggo Tingkat Rukun Warga (RW) yang merujuk pada Instruksi Gubernur Nomer 1 Tahun 2020. Selain itu, terdapat standarisasi sebagai penguat dalam bentuk dokumen, mengenai pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, seperti bagan alur penanganan yang memiliki standar yang telah ditentukan pada saat bimbingan teknis, dan pembentukan serta alur koordinasi satgas jogotonggo yang sudah terdapat standarisasi dalam Intruksi Gubernur No.1 Tahun 2021.

6. *Distributive Accountability*

Distributive accountability adalah Penataan dan Pengelolaan manajemen oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi covid-9 di Kelurahan Mangkubumen. *Distributive Accountability* meliputi prosedur penanggulangan penanganan pandemi covid-19 mulai dari pencegahan hingga tindak lanjut dari kasus positif, dan Proses perencanaan hingga evaluasi program kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. Berdasarkan hasil

wawancara, terdapat prosedur-prosedur dalam bentuk SOP yang mengatur mengenai penanganan pandemi Covid-19 khususnya di Kelurahan Mangkubumen, SOP tersebut dibuat oleh Satgas Covid-19 di tingkat Kota Surakarta. Proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi dalam penanganan di Kelurahan Mangkubumen dilaksanakan bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat seperti Kelurahan, Babinsa Babinkamtibnas, Puskesmas, dan Satgas JogoTonggo. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan secara rutin dan berkala melalui media whatsapp atau juga dilaksanakan secara langsung di Pendopo Kelurahan atau Sasono Krida Warga Mangkubumen.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah 20 SOP yang dibuat oleh Pemerintah Kota terkait setiap kegiatan penanganan pandemi covid-19 yang ada. namun, tidak semua SOP tersebut disampaikan dan dibagikan kepada penanganan pandemi tingkat kelurahan, karena terdapat SOP yang memang dikhususkan untuk diterapkan dalam tingkat kota saja, seperti SOP Penyusunan Peraturan Walikota, SOP Komunikasi Publik, dan sebagainya. Sehingga tidak semua SOP yang ada bisa diterapkan di Kelurahan Mangkubumen. Sedangkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang

dilakukan belum bisa dilaksanakan secara konsisten dan terjadwal karena adanya kendala pembatasan sosial yang tidak menentu dan menyesuaikan urgensi atau kebutuhan pembahasan.

7. *Information Sharing*

Information sharing adalah kemudahan akses informasi dan manajemen informasi dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen. *Information sharing* dapat dilihat dari aspek mudahnya akses informasi bagi masyarakat mangkubumen, koordinasi antar para stakeholders, dan sistem informasi dan komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara, pembagian informasi mengenai data jumlah warga yang terpapar atau terkonfirmasi positif kepada masyarakat juga sudah dilakukan secara transparan dan terbuka dengan tetap menjaga privasi bagi terkonfirmasi. Pembagian tersebut dilakukan melalui RT dan RW masing-masing kemudian diteruskan kembali kepada masyarakat. Proses komunikasi dan informasi dalam penanganan covid-19 di Kelurahan Mangkubumen antar pihak yang terlibat dimulai dari informasi yang diberikan oleh Puskesmas kepada Kelurahan dan Satgas JogoTonggo yang mana kemudian dijadikan bahan untuk melakukan proses

penanganan berikutnya. Bentuk komunikasi lainnya juga terjadi dari bawah ke atas, petugas Satgas JogoTonggo di tingkat RW juga dapat melaporkan kasus atau memberikan update data tentang warganya ke Kelurahan. Jadi tidak menutup kemungkinan komunikasi bisa dimulai dari setiap pihak yang terlibat. Peneliti menemukan adanya data sekunder berupa dokumentasi terkait pembagian informasi mengenai data jumlah warga yang terpapar atau terkonfirmasi positif melalui whatsapp benar benar dilaksanakan dengan adanya tambahan data sekunder berupa dokumentasi pesan whatsapp yang dibagikan kepada masyarakat terkait data jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif di Kelurahan Mangkubumen.

8. *Acces to Resources*

Acces to resources adalah Ketersediaan Sumber daya manusia, sumber daya finansial (keuangan), dan Sumber daya sarana prasarana yang dimiliki dalam mencapai tujuan. *Acces to resources* meliputi Petugas struktural dan petugas lapangan, Petugas tambahan/bantuan (masyarakat dan Swasta) dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, Anggaran program kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, dan

Fasilitas bagi orang terjangkit virus covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat peneliti, Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan pandemi covid-19 ini adalah Petugas medis atau kesehatan dari puskesmas Manahan, Petugas Satgas JogoTonggo, Petugas Kelurahan, petugas tracer, dan petugas lainnya yaitu seperti Babinsa, Babinkamtibnas dan Satlinmas. Adapun sumber daya keuangan dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen adalah berasal dari Dana Anggaran DPA Kelurahan Mangkubumen dan juga sumber pendanaan lain selain dari pemerintah, seperti dana yang berasal dari swadaya masyarakat atau sumber pendanaan lain dalam bentuk bantuan sosial yang berasal dari swasta seperti PMS dan IKA UNS. Sumber Daya Sarana Prasarana meliputi fasilitas yang didapatkan bagi warga yang terpapar virus covid-19, apabila mengalami sakit yang parah maka akan menjalani perawatan secara gratis di Rumah Sakit rujukan, dan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri keluarga tersebut akan mendapatkan bantuan berupa sembako dari Dinas Sosial, Kecamatan, Masyarakat, dan swasta lainnya.

PENUTUP

Penanganan Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berhasil, berdasarkan aspek *Collaborative Governance*. Adapun indikator tersebut adalah :

1. Network Structure

Jenis struktur kolaborasi yang diterapkan dalam konteks penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen adalah *Lead Organization*. Bentuk sinergi juga dapat dilihat pada pembagian tugas juga dilakukan. Terdapat penguatan kelembagaan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan.

2. Commitment to a common purpose

Kelurahan Mangkubumen tidak memiliki tujuan bersama yang dirumuskan bersama sebagaimana dimaksud dalam teori, Namun dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, memiliki tujuan yang tercantum pada Surat Edaran Walikota Nomor 440/1439 tahun 2020. Penguatan tujuan dan meningkatkan kesepahaman juga dilakukan dengan menjalankan beberapa program atau kegiatan dengan keterlibatan masyarakat.

3. Trust among the participants

sudah terdapat kepercayaan antar pihak yang terlibat yang dapat dilihat dari berjalannya program-program yang telah terselesaikan. Program-program yang telah terselesaikan juga sudah tepat sasaran.

4. *Governance*

Pada proses penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen sudah menjalankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Berdasarkan empat aspek kepastian governance menurut teori De Seve, Pada penanganan pandemi di Kelurahan Mangkubumen aspek *Boundary* dan *exclusivity* sudah terpenuhi, aspek *Rules* tidak terpenuhi, sedangkan aspek *Self determination* dan *Network management* masih belum terlaksana secara tegas.

5. *Acces to authority*

Terdapat landasan hukum dalam pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen, yaitu SE Walikota Nomor 440/1439 tahun 2020, terdapat standarisasi sebagai penguat dalam bentuk dokumen mengenai pelaksanaan penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen.

6. *Distributive accountability*

Terdapat prosedur-prosedur dalam bentuk SOP yang dibuat oleh Pemerintah Kota yang

mengatur penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan belum bisa dilaksanakan secara konsisten dan menyesuaikan urgensi pembahasan.

7. *Information sharing*

Pembagian akses informasi bagi masyarakat mengenai data yang terpapar covid-19 di Kelurahan Mangkubumen dapat diakses oleh masyarakat melalui media whatsapp. Proses komunikasi dan informasi dalam penanganan covid-19 di Kelurahan Mangkubumen antar pihak yang terlibat dimulai dari informasi yang diberikan oleh Puskesmas, bentuk komunikasi lainnya bisa dimulai dari setiap pihak yang terlibat.

8. *Acces to resources*

Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan pandemi covid-19 ini adalah Petugas medis dari puskesmas Manahan, Petugas Satgas JogoTonggo, Petugas Kelurahan, petugas tracer, dan Babinsa, Babinkamtibnas dan Satlinmas. Adapun sumber daya keuangan dalam penanganan pandemi covid-19 di Kelurahan Mangkubumen adalah berasal dari Dana Anggaran DPA Kelurahan Mangkubumen dan sumber pendanaan lain seperti dana yang berasal dari swadaya masyarakat atau bentuk

bantuan sosial yang berasal dari swasta seperti PMS dan IKA UNS. Sumber Daya Sarana Prasarana meliputi fasilitas yang didapatkan bagi warga yang terpapar virus covid-19, apabila mengalami sakit yang parah maka akan menjalani perawatan secara gratis di Rumah Sakit rujukan, dan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri keluarga tersebut akan mendapatkan bantuan berupa sembako dari Dinas Sosial, Kecamatan, Masyarakat, dan swasta lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyanti, Yati. 2008. "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol 12 No(2) hal 137-141.
- Amin, Raja Muhammad, Rury Febrina, and Baskoro Wicaksono. 2021. "Handling COVID-19 from a Collaborative Governance Perspective in Pekanbaru City." *Jurnal Bina Praja* 13(01): 1–13.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543–71.
- B.D., Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Penang, Malaysia: CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural System.
- Bila, Aziza, and Boni Saputra. 2019. "Collaborative Governance Strategy in Government Sector." *Jurnal Transformasi Administrasi* 9(2): 196–210.
- De Seve, G Edward. 2007. *The Business of Government*. IBM Center for The Business of Government.
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil." Universitas Sebelas Maret Durakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. 2010. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government Ke Governance*. UGM Press.
- Ekha, Roni, Tengku Rika, Putri Febri, and Nia Audina. 2020. "Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 Di Kota Padang. In *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, , 133–37.
- Haryono, N. 2012. "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik." *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 01.
- Irawan, Denny. 2017. "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya)." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 5: 1–12.
- Islamy, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: DeePublish (CV Budi Utama).
- Kedeikoto, Fransina Aucsilia. 2020. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Top Selfie Di

- Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.”* Skripsi. Universitas Tidar Magelang.
- Miles, Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muta’al, Muhammad Rofiud, and Aprilia Setyowati. 2021. “Strategi Collaborative Governance Pada Rangka Resiliensi Di Masa Pandemi Covid-19.” In Slamet Riyadi Conference On Public Administration, , 21–36.
- Nazir, Moh. 2012. *Metode Penelitian*. Bogor.: Ghalia Indonesia.
- Nogi S., Hessel. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung.
- Pramono, Joko, and Farco Siswiyanto Raharjo. 2020. “Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Desiase (Covid)-19.” *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* 2(2): 57–69.
- Prasetyo, Sandy Mahendra. 2021. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Magelang.” Skripsi. Universitas Tidar Magelang.
- Purwanto, Agus. dkk. 2020. “Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar.” Universitas Pelita Harapan.
- Qalby, Andi Nur. 2018. “Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat).” Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Raharjo, Farco Siswiyanto. 2021. “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Corona Virus Diseases (COVID)-19 Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen Tahun 2020.” *Jl@P Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10(02): 71–80.
- Riefkah, Farras Alya. 2020. “Collaborative Governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Banda Aceh.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar Raniry.
- Rivelino, Rivelino, and Arwanto Harimas Ginting. 2020. “Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid - 19 Dki Jakarta.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13(1): 36–51.
- Sugeng Cahyono, Anang. 2021. “Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19.” *Jurnal Publiciana* 14(01): 83–88.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarwo, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Thomson, Ann Marie, and James L Perry. 2006. "Collaboration Processes: Inside the Black Box." *Public Administration Review* 66(01): 20–32.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zaenuri, M, and T Sulaksono. 2015. "Pengelolaan Pariwisata-Bencana Berbasis Kolaboratif Governance (Studi Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Di Kabupaten Sleman)." Research Repository UNY.
- Zulmi, Rizal. 2018. "Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Berbasis Collaborative Governance (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Malang)." Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- <https://covid.intip.surakarta.go.id/> diakses pada Kamis, 9 September 2021
- Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 067/495 Tahun 2021.
- Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 440/1439 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo di Tingkat Rukun Warga (RW)
- Surat Instruksi Gubernur Jateng No 1 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid19 - Satgas Jogo Tonggo
- Surat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.